

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara besar, terbentang luas dari Sabang hingga ke Merauke. Tersusun dari beragam suku bangsa yang sudah pasti memiliki keanekaragaman kebudayaan, pariwisata, dan sumber daya alam masing-masing. Setiap tahun pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan. Upaya tersebut berupa mengoptimalkan pengelolaan terhadap sumber daya alam atau non alam secara baik demi kepentingan bersama.

Indonesia adalah negara yang gencar dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat sebagai solusi untuk mengatasi persoalan ekonomi di negara kita. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan oleh pemerintah bermakna bahwa pemerintah memberikan wewenang secara penuh kepada daerah atau kabupaten untuk mengelola dan mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi serta kekayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan daerah termasuk dalam masalah meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan ekonomi, memicu banyak daerah untuk berusaha meningkatkan pendapatan masing-masing daerahnya.

Penyerahan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, peningkatan pelayanan, dan partisipasi masyarakat. Definisi

dari suatu pemberdayaan masyarakat adalah proses atau cara untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas masyarakat. Kegiatan pemberdayaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah dan mengubahnya menjadi peluang dan kekuatan daerah.

Potensi kekayaan alam yang dimiliki daerah sangat beragam, mulai dari hasil perikanan, hasil perkebunan, hasil pertanian, dan lain sebagainya. Salah satu hasil alam yang sangat diminati oleh masyarakat umum adalah buah. Buah-buahan menjadi komoditi yang selalu laris di pasaran, termasuk buah salak. Buah salak merupakan buah khas yang dimiliki oleh Indonesia, dalam bahasa Inggris biasa disebut *snake fruit* karena kulit buahnya menyerupai sisik ular. Provinsi Jawa Tengah memiliki lahan yang cocok untuk tumbuh berkembangnya buah salak sehingga banyak menghasilkan buah salak.

Tabel 1.1**Produksi Salak Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

No	Kabupaten/ Kota	Hasil Produksi Buah Salak (kuintal)	Persentase (%)
1	Banjarnegara	3.626.784	75
2	Magelang	681.137	14,1
3	Wonosobo	449.407	9,3
4	Temanggung	19.464	0,4
5	Semarang	8.594	0,18
6	Kota Salatiga	8.477	0,17
7	Pekalongan	7.154	0,14
8	Purbalingga	4.974	0,10
9	Banyumas	4.726	0,09
10	Batang	4.211	0,08
11	Wonogiri	3.181	0,06
12	Cilacap	2.010	0,04
13	Karanganyar	1.581	0,03
14	Purworejo	1.188	0,02
15	Kendal	1.150	0,02
16	Kebumen	1.123	0,02
17	Brebes	1.049	0,02
18	Tegal	937	0,01
19	Pati	710	0,01
20	Boyolali	608	0,01
21	Klaten	327	0,006
22	Jepara	324	0,006

23	Kota Semarang	202	0,004
24	Kota Magelang	63	0,0001
25	Blora	46	0,0009
26	Pemalang	40	0,0009
27	Rembang	19	0,0003
28	Sragen	1	0,0002
29	Sukoharjo	-	0
30	Kudus	-	0
31	Demak	-	0
32	Grobogan	-	0
33	Kota Surakarta	-	0
34	Kota Pekalongan	-	0
35	Kota Tegal	-	0
	TOTAL	4.829.487	100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2019

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 menyebutkan bahwa Kabupaten Magelang menduduki peringkat kedua dalam produksi salak dengan persentase sebesar 14,1% dari total produksi salak di Jawa Tengah. Kabupaten Magelang telah menghasilkan salak sebanyak 681.137 kuintal pada tahun 2019. Potensi salak memang sangat bagus di Kabupaten Magelang karena daerahnya yang termasuk dataran tinggi membuat iklim yang baik bagi berkembangnya salak di daerah tersebut.

Tabel 1.2

Produksi Buah Salak Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Hasil Produksi Salak (kuintal)	Persentase (%)
1	Srumbung	562.079	82,5
2	Salam	89.534	13,14
3	Kajoran	10.511	1,54
4	Candimulyo	5.376	0,79
5	Dukun	3.608	0,53
6	Ngluwar	3.358	0,49
7	Grabag	1.755	0,26
8	Windusari	1.233	0,18
9	Kaliangkrik	1.076	0,15
10	Salaman	954	0,14
11	Mungkid	779	0,11
12	Tegalrejo	164	0,02
13	Muntilan	160	0,02
14	Sawangan	130	0,01
15	Borobudur	128	0,01
16	Bandongan	114	0,01
17	Tempuran	86	0,01
18	Secang	32	0,004
19	Mertoyudan	20	0,002
20	Ngablak	-	0
21	Pakis	-	0
TOTAL		681.137	100

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2019

Berdasarkan (Tabel 1.2) kita dapat mengetahui bahwa Kecamatan Srumbung merupakan daerah penghasil salak terbanyak di Kabupaten Magelang dengan persentase sebesar 82,5% dari total hasil produksi salak di Kabupaten Magelang. Pada tahun 2019 Kecamatan Srumbung menghasilkan salak sebesar 562.079 kuintal. Melihat data tersebut dapat diketahui bahwa potensi sumber daya salak yang dimiliki sangat baik. Kecamatan Srumbung memiliki 17 desa, salah satunya adalah Desa Ngargosoko. Desa Ngargosoko adalah desa yang memiliki potensi salak melimpah di Kecamatan Srumbung. Desa Ngargosoko ini ditetapkan menjadi desa wisata berdasarkan SK Bupati Magelang Nomor 180.182/204/KEP/19/2018 tahun 2018. Desa ini tersusun dari tujuh dusun yang masing-masing memiliki ciri khas sendiri, seperti yang disampaikan oleh Pak Suji selaku sekretaris Desa Ngargosoko:

“Iya jadi di Desa Ngargosoko ini terdiri dari tujuh dusun yang punya kelebihan masing-masing, di antaranya ada yang memiliki ciri khas mengembangkan kesenian daerah seperti Jathilan dan Dayakan. Lalu ada juga yang membuat kerajinan-kerajinan rumahan, dan yang paling unggulan dari desa kami, yaitu produksi salaknya melimpah.”

Fasilitas yang menjadi unggulan dan daya tarik tersendiri bagi Desa Ngargosoko, yaitu adanya perkebunan buah salak yang banyak dimiliki oleh masyarakat desa tersebut. Lokasi yang berada di dekat Gunung Merapi membuat tanah disekitar daerah tersebut menjadi subur sehingga tanaman salak mampu tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah salak yang melimpah saat panen di daerah ini. Keunggulan ini merupakan potensi yang perlu untuk dimanfaatkan dengan baik. Saat musim panen raya, para petani salak mampu menghasilkan ratusan kilogram buah salak hasil kebun. Salak

merupakan potensi unggulan di desa ini karena kuantitasnya yang melimpah serta kualitasnya yang bagus pula. Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ngargosoko:

“Kecamatan Srumbung memang menjadi penghasil salak terbanyak di Magelang, sedangkan untuk peringkat desa, Desa Ngargosoko ini salah satu yang terbanyak. Tapi yang sangat disayangkan, di Ngargosoko ini salaknya melimpah, tapi hanya dibiarkan dijual begitu saja tidak ada inovasi untuk dibuat olahan baru sehingga salak tidak cepat busuk dan harganya naik.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa besarnya angka hasil produksi salak di Desa Ngargosoko menjadikan desa tersebut sebagai daerah penghasil salak salah satu yang terbesar di Kabupaten Magelang. Potensi desa ini sangat menarik sekali dan mampu menjadi sumber pendapatan masyarakat yang menjanjikan apabila dikelola dengan baik. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu tidak ada tindak lanjut dan pengolahan yang baik terhadap buah-buah salak tersebut sehingga membuat harga menjadi anjlok dan membuat para petani salak gigit jari. Harga jual salak saat bukan musim panen biasanya sekitar Rp 5.000 - 7.000/kg, sedangkan harga saat panen raya bisa turun sampai Rp 1.000 - 1.800/kg. Melimpahnya sumber daya salak yang ada belum diimbangi dengan upaya pemanfaatan salak menjadi barang lain yang mempunyai nilai jual lebih tinggi. Dibutuhkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan salak di Desa Ngargosoko agar daya jual buah salak di desa tersebut menjadi meningkat sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 12, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Adanya pemberdayaan masyarakat ini memiliki tujuan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa tersebut sehingga mampu mengembangkan usaha dan potensi di daerahnya. Peran dari pemberdayaan, yaitu untuk memperkuat kemampuan masyarakat agar bisa makin mandiri. Masyarakat perlu dibantu agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat dengan potensi yang dimiliki, tapi juga sekaligus meningkatkan ekonomi sosial (Mardikanto dan Soebiato, 2013:70).

Pemerintah Desa Ngargosoko sudah beberapa kali melakukan upaya-upaya memberdayakan masyarakat melalui pelatihan usaha kecil menengah seperti pembuatan bakpia salak, keripik salak, dan lain-lainnya agar mampu meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga menjadi penambah daya tarik wisata namun minat masyarakat masih sedikit. Masyarakat daerah masih belum terbuka terhadap perubahan dan nyaman dengan kondisi sekarang, sehingga masih enggan mengikuti program pemberdayaan yang diadakan. Adanya permasalahan tersebut mencerminkan dibutuhkan penyadaran

terhadap kondisi yang terjadi, agar masyarakat mau berubah dalam melakukan mekanisme pengolahan salak yang ada.

Pemerintah daerah sebaiknya mengambil tindakan atau peranan lebih besar karena yang paling mengerti kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakatnya adalah mereka. Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Ngargosoko khususnya dalam pengelolaan salak masih kurang maksimal. Para petani salak masih membutuhkan upaya pemberdayaan agar mereka mampu mengolah potensi sumber daya salak yang banyak tersebut menjadi olahan lain yang bernilai jual lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi kekuatan di daerah tersebut.

1.1.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

Jurnal (1)	Artikel dan Pengarang (2)	Tujuan (3)	Temuan (4)	Perbedaan Penelitian (5)
<i>Program of community Empowerment Prevents Forest in Indonesian Peat Land</i>	Sciencedirect . Arifudin, Besri, Nasrul, Mawadi (2013)	Bagaimana memecahkan masalah dengan melibatkan dan memunculkan kesadaran masyarakat lokal melalui pemberdayaan masyarakat.	Pemberdayaan masyarakat harus dirancang dengan memperhatikan keseimbangan antara masyarakat dan tujuan dari program sebagai pembangunan berkelanjutan. <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> a. Kesadaran masyarakat b. Kemampuan masyarakat • Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan b. Pengawasan c. Perencanaan 	Penelitian ini memiliki kesamaan kaitannya dalam memecahkan masalah kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal yang ada. Namun, yang membedakan adalah fokus dan lokus penelitian yang tidak sama.
<i>Empowerment Strategy Through Salak Fruit</i>	Prajanti, Sucihatiningih D.W, Fafurida, Avi Budi S, Himawan Arif S. <i>International Journal of Indonesian Society and Culture</i> . (2015).	Untuk mengeksplorasi praktek pemberdayaan melalui cara pendampingan petani salak.	Hasil dari penelitian ini, yaitu bahwa dalam melakukan pemberdayaan untuk membuat kesejahteraan petani salak di Sleman, DIY meningkat maka diperlukan adanya strategi pemberdayaan	Persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah pada pemberdayaan dalam pengolahan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Empowerment Community in Buru Regency</i>	<i>Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Pilsen, Czech Republic, July 23-26. (2019)</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas Komunitas Pemberdayaan yang diadakan di Kabupaten Buru sejak tahun 2005 hingga 2014.	berupa membangun kerjasama. Pemberdayaan salak ini dapat melibatkan pihak luar seperti swasta (industri) yang berhubungan langsung dengan pasar salak tersebut. Hasil analisis data menunjukkan selama periode 2005-2014 pelaksanaan pemberdayaan di Kabupaten Buru belum mencapai nilai substansi yang diinginkan. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait program. Banyak program yang tumpang tindih antara pelaksanaan program pusat dan regional serta ketergantungan program pada sistem penganggaran.	salak sehingga bernilai jual lebih tinggi dan lebih menarik. Perbedaan yang ditemui yaitu pada lokus penelitian dan metode penelitian. Penelitian ini menjelaskan bahwa program pemberdayaan yang ada di suatu desa seringkali terjadi tumpang tindih antara pusat dan daerah. Hal ini mampu menjadi bahan pertimbangan penulis dalam menulis penelitian ini.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera Berbasis <i>Entrepreneur</i> Melalui Pemanfaatan Buah Salak</p>	<p>Fathani, Abdul Halim. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Vol.1 No.1 (2020)</p>	<p>Untuk mengetahui jenis pemberdayaan apa yang cocok dilakukan di Desa Sonowangi, Malang yang memiliki potensi salak yang melimpah namun tidak dibarengi dengan kemampuan dalam mengolah.</p>	<p>Perlu ada perubahan dalam pola pelaksanaan program pemberdayaan, yaitu integrasi program pemberdayaan masyarakat di tingkat struktur dan operasional. Harus ada alur yang jelas agar tidak terjadi penumpukan program di daerah tersebut.</p> <p>Pemberdayaan yang dipilih untuk dilakukan di Desa Sonowangi, Malang yang memiliki potensi salak melimpah, yaitu dengan melaksanakan program kerja pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembuatan makanan seperti nastar salak.</p>	<p>Persamaan yang ada, yaitu pada masalah yang dihadapi. Desa Sonowangi dan Desa Ngargosoko memiliki hasil salak melimpah namun belum dimanfaatkan dengan baik.</p> <p>Perbedaan yang ada, yaitu pada lokus penelitian.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Pemberdayaan Usaha Rumah Tangga Olahan Buah Salak Sradha Di Kabupaten Karangasem Bali</p>	<p>Telagawathi, Ni Luh W.S. Jurnal Widya Laksana Vol. 6 No.2 Universitas Pendidikan Ganesha. (2017).</p>	<p>Penelitian ini bertujuan menganalisis program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas hasil produksi dari olahan buah salak, memperluas jangkauan pemasaran dan mitra usaha.</p>	<p>Usaha-usaha pemberdayaan usaha kecil rumah tangga olahan buah salak sangat membutuhkan langkah-langkah yang tepat.</p> <p>Program-program yang ada yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah untuk mengembangkannya dirinya, seperti pemenuhan alat-alat produksi 2. Perluasan pemasaran hasil produk yang dapat dilakukan melalui <i>website, online shop, atau social media.</i> 3. Mempermudah akses permodalan, seperti bekerjasama dengan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) 	<p>Persamaan yang ditemui dalam penelitian ini, yaitu tentang bagaimana usaha-usaha dalam melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya rumah tangga. Perbedaan terdapat pada lokus penelitian.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Pemberdayaan Kelompok Aisyiyah dalam Pengelolaan Salak Pondoh di Kecamatan Turi, Sleman</p>	<p>Setiawan, Adi Nugroho dan Sukuriyati Susilo Dewi. Jurnal Berdikari Vol.4 No. 2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2016).</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini, yaitu meningkatkan nilai tambah dari buah salak pondoh melalui industri hilir salak pondoh yang diolah menjadi bermacam-macam produk. Selain itu juga meningkatkan kemampuan anggota Aisyiyah.</p>	<p>Hasil dari penelitian pemberdayaan ini, yaitu respon dan tanggapan masyarakat anggota Aisyiyah sangat baik dan meningkatkan wawasan serta keterampilan anggota dalam pengelolaan salak pondoh jadi produk minuman serta brownies.</p> <p>Hal yang paling penting diperhatikan, yaitu koordinasi.</p> <p>Pelaksanaan pemberdayaan ini dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penyuluhan 2. Fasilitasi pelatihan dan praktek pendampingan 	<p>Persamaan yang penulis temukan dalam penelitian ini, yaitu tentang permasalahan dan solusi untuk meningkatkan nilai tambah buah salak.</p> <p>Perbedaan terletak pada lokus penelitian yang berbeda.</p>
<p>Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal</p>	<p>Mustangin, Desy Kusniawati, Nufa Pramina Islami,</p>	<p>Bertujuan mengetahui bentuk pemberdayaan masyarakat pada program</p>	<p>Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan memaksimalkan program desa</p>	<p>Persamaan yang ada, yaitu tentang bagaimana mengoptima</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji	Baruna Setyaningrum, Eni Prasetyawati. Universitas Padjadjaran(2017).	desa wisata.	wisata berbasis potensi lokal. Desa wisata Bumiaji memberikan perubahan terutama pada peningkatan pengetahuan dan ekonomi masyarakat.	Ikan potensi lokal masyarakat menjadi komoditi yang menarik. Perbedaannya terdapat pada bagian lokus yang diambil.
Wisata Alam Jurang Jero: Pengembangan Ekologi Wisata Kolaborasi Taman Nasional Gunung Merapi Dan Masyarakat.	Muhammad Khanifudin. Skripsi Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).	Untuk mengetahui upaya yang dilakukan TNGM dan peran masyarakat dalam pengolahan pariwisata di Jurang Jero.	Upaya yang dilakukan oleh pihak Taman Nasional Gunung Merapi adalah 1. Membangun SDM melalui Kelompok Wisata Jurang Jero. 2. Merubah zonasi dan pemetaan desain ruang publik untuk digunakan sebagai kawasan wisata serta membangun infrastruktur	Persamaan pada lokus yaitu di Desa Ngargosoko Perbedaan ada pada penelitian ini berfokus pada pengembangan wisata Jurang Jero, sedangkan penulis meneliti pemberdayaan salak

Penelitian dari Arifudin, Besri Nasrul, dan Mawasdi berjudul *Program Of Community Empowerment Prevents Forest Fires In Indonesia Peat Land* ini dilatar belakangi oleh banyaknya titik *hotspot* yang menandakan adanya kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Kalimantan Barat. Untuk mengatasi masalah ini kemudian dilakukan beberapa cara seperti pemantauan dan pencegahan. Akan tetapi masalah utama belum terpecahkan karena masyarakat masih bermasalah pada sosial ekonomi. Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan menumbuhkan kesadaran rakyat lewat program pemberdayaan. Jurnal ini memberikan informasi bahwa pemberdayaan itu harus memperhatikan keseimbangan antara sumber daya yang ada dengan tujuan program. Aspek yang diteliti, yaitu tumbuhnya motivasi atau kesadaran masyarakat dan meningkatnya kapasitas suatu masyarakat dalam menyelesaikan masalah serta mengambil keputusan. Kesimpulan yang dapat diambil, yaitu memberdayakan adalah menciptakan komunitas yang sadar akan keadaan dan memberi daya berupa keterampilan bagi masyarakatnya untuk memecahkan masalah.

Jurnal berjudul *Empowerment Community in Buru Regency* yang ditulis oleh M Chairul, Rosita, Mukaddar, Abdul Latif, dan Riki Bugis ini mendeskripsikan tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Kabupaten Buru memiliki potensi sumber daya yang sangat besar, untuk itu dilakukan kegiatan pemberdayaan sejak tahun 2005. Menurut penelitian ini, selama periode 2005-2014 program pemberdayaan belum berjalan lancar. Dapat dilihat dari rendahnya tingkat

partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan yang ada. Ini terjadi karena adanya tumpang tindih program antara daerah dan pusat sehingga kurang memberikan manfaat pada masyarakat. Hal ini bisa menjadi pertimbangan penulis dalam menyusun penelitian.

Jurnal yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat untuk Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera Berbasis *Entrepreneur* Melalui Pemanfaatan Buah Salak yang ditulis oleh Abdul Halim Fathani ini mendeskripsikan tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berada di Desa Sonowangi, Malang. Desa ini mempunyai banyak potensi yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, salah satunya yang paling menonjol adalah buah salak. Produksi buah salak yang melimpah tidak sebanding dengan pemanfaatan buah tersebut sehingga harganya menjadi murah, untuk itu diadakan program pemberdayaan masyarakat. Program yang dipilih yaitu pelatihan pembuatan nastar nanas bagi masyarakat desa. Program ini bertujuan untuk menaikkan harga salak yang ada sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat. Jurnal ini baik untuk bahan pertimbangan penulis dalam menyusun penelitian ini karena sama-sama membahas tentang pengelolaan sumber daya salak.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti sebelumnya tentang pemberdayaan dapat menjadi bahan pembelajaran, yang menjadi pembeda penelitian saya dengan penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian ini saya lebih menitikberatkan pada hasil pemberdayaan masyarakat

yang ada di Desa Ngargosoko. Teori yang saya gunakan, yaitu melihat dari dimensi keberhasilan suatu pemberdayaan masyarakat.

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan pemberdayaan menjadi sangat penting untuk dilakukan terkait dengan pengembangan suatu desa maka mendorong penulis untuk mengangkat judul penelitian, yakni **“Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Salak di Desa Ngargosoko Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang”**.

1.2.RUMUSAN MASALAH

Pengelolaan sumber daya salak yang berada di Desa Ngargosoko adalah salah satu usaha yang diperlukan untuk memberdayakan masyarakat dan mengembangkan potensi desa yang bertujuan meningkatkan produktifitas masyarakat agar lebih mandiri. Sesuai dengan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya maka penelitian ini membahas rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan salak di Desa Ngargosoko Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang?
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat di Desa Ngargosoko Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang?

1.3.TUJUAN

Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam pengelolaan salak di Desa Ngargosoko Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan salak di Desa Ngargosoko Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.

1.4.MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang terkait, sekaligus menjadi manfaat di antaranya:

1. Bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dan pihak desa untuk lebih memperhatikan potensi dan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat desa.
2. Tambahan pengetahuan dalam bidang pendidikan terkait dengan permasalahan pemberdayaan masyarakat desa untuk lembaga maupun pembaca yang membutuhkan.

1.5.KERANGKA TEORI

1.5.1. Administrasi Publik

Menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (dalam Syafiie, 2006: 23) berpendapat bahwa Administrasi Publik adalah:

1. Implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Koordinasi usaha kelompok maupun perorangan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terutama kegiatan sehari-hari pemerintah.
3. Proses yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, memberikan pengarahan, dan teknik-teknik terhadap suatu usaha.

Administrasi Publik, menurut Chandler dan Plano (dalam Keban 2014: 3), mengemukakan bahwa administrasi publik merupakan proses pengorganisasian dan pengkoordinasian sumber daya yang ada untuk memformulasikan, mengimplementasi, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Syafiie, 2006:24) administrasi publik adalah administrasi yang dilakukan negara sebagai organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan kenegaraan.

Pendapat menurut Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:6) administrasi publik merupakan perpaduan antara praktek dan juga teori yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hubungan peran pemerintah dan masyarakat, serta mendorong kebijakan publik agar

semakin responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berupaya mengembangkan praktik-praktik manajemen agar mampu menjadi efektif, efisien, dan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat dari ahli yang telah dikemukakan dapat diketahui bahwa administrasi publik merupakan manajemen dalam pengelolaan organisasi manusia yang bertujuan mencapai tujuan pemerintahan, melaksanakan pembangunan serta mengelola atau melayani kepentingan masyarakat.

1.5.2. Paradigma Administrasi Publik

Suatu disiplin ilmu bisa ditelusuri perkembangannya melalui perubahan paradigma. Administrasi Publik terus tumbuh mengikuti perkembangan zaman sehingga sampai saat ini terdapat enam paradigma Administrasi Publik yang berguna untuk memberi gambaran terkait perubahan-perubahan dan perbedaan dalam tujuan, teori, dan metodologi atau dalam nilai-nilai yang menjadi dasar. Paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry (dalam Syafiie, 2006:27) sebagai berikut:

a. Paradigma 1 Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1927)

Pada buku "*Politics and Administration*" Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow memberikan pendapat bahwa pemerintah mempunyai dua fungsi berbeda. Pertama ada fungsi politik yang berpusat pada pembuatan kebijakan sesuai

kehendak rakyat. Kedua, fungsi administrasi yang lebih pada pemberian perhatian pada implementasi kebijakan.

Paradigma ini memiliki implikasi bahwa administrasi dianggap sebagai sesuatu yang bebas nilai dan mengarah pada pencapaian nilai efisiensi dan ekonomi dari birokrasi pemerintahan. Paradigma ini lebih menekankan pada lokusnya, yaitu birokrasi pemerintahan. Sementara metode dan fokus yang ada kurang dibahas pada paradigma ini.

b. Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1937)

Fokus pada paradigma ini adalah prinsip-prinsip administrasi. Prinsip ini dapat diterapkan di mana-mana yang meliputi *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting* (POSDCORB). Sementara lokus paradigma ini tidak jelas karena prinsip tersebut bisa diimplementasikan di manapun. Tokoh yang mendukung paradigma ini antara lain Willaughby, Gullick dan Urwick, Taylor dan Fayol.

c. Administrasi Publik/Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Munculnya paradigma ini disebabkan oleh banyaknya kritik yang memperlakukan pemisahan antara politik dan administrasi. Kritik lain, yaitu terkait dengan prinsip administrasi yang dianggap tidak konsisten sehingga tidak

dapat diimplementasikan secara universal. Lokus administrasi publik berada pada birokrasi pemerintahan. Fokus pada paradigma ini tidak jelas karena prinsip administrasi publik punya banyak kekurangan. Tokoh pada paradigma ini, yaitu Herbert Simon, Morstein-Marx, John Gaus.

d. Administrasi Publik sebagai Ilmu Adminisitrasi (1956-1970)

Paradigma ini menitikberatkan bahwa administrasi negara fokus pada ranah prinsip-prinsip manajemen yang telah ada kemudian dikembangkan lagi seperti perilaku organisasi, analisis sistem, riset operasi ataupun manajemen yang sudah maju. Lokus paradigma ini tidak jelas karena fokusnya dapat diterapkan ke dunia bisnis maupun administrasi publik.

e. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Paradigma terakhir sudah dilengkapi dengan lokus dan fokus yang jelas. Fokus paradigman ini, yaitu teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sementara itu lokusnya adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan kepentingan publik.

1.5.3. Manajemen Publik

George Terry (dalam Syafiie, 2006:49) berpendapat bahwa manajemen merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat lain dikemukakan oleh Prajudi (dalam Syafiie, 2006:49) menerangkan bahwa manajemen adalah pemanfaatan dan pengendalian dari sumber daya serta faktor-faktor yang ada melalui sebuah perencanaan agar dapat mencapai tujuan tertentu.

Empat prinsip dasar bagi studi administrasi publik yang dikemukakan oleh Wilson (dalam Keban, 2014:100), yaitu:

- a) *Setting* utama organisasi, yaitu pemerintah
- b) Eksekutif berfungsi sebagai fokus utama ;
- c) Kunci pengembangan kompetensi administrasi ada pada perencanaan prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang efektif ;
- d) Metode perbandingan digunakan sebagai metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik.

Hubungan antara manajemen publik dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu seperti hubungan kemampuan manajer dalam pengorganisasian, di mana dalam pemberdayaan pemerintah mengelola dan mengorganisasikan masyarakat dengan potensi sumber daya yang berada di lingkungannya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

1.5.4. Pemberdayaan

Pendapat ahli terkait pemberdayaan masyarakat diungkapkan salah satunya dari Mardikanto dan Soebiato (2013:100), yaitu sebuah proses perubahan ekonomi, sosial, dan politik yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dengan cara memberikan daya dan belajar bersama. Perubahan ini dilakukan pada semua aspek (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat, demi terwujudnya kehidupan yang mandiri, berdaya, dan sejahtera secara berkelanjutan. Definisi lain juga dikatakan oleh Wrihantnolo dan Dwidjowijoto (2007:2) pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi bukan sebuah proses instan, sebagai suatu proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan, yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Pendapat dari Mas'ood dalam (Mardikanto dan Soebiato, 2013:26) menerangkan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai usaha untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pandangan lain juga dikatakan oleh Sumodiningrat (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013:26) yang berbunyi pemberdayaan masyarakat berarti kemampuan masyarakat yang bersatu dalam membangun keberdayaan masyarakat. Dari beberapa definisi para ahli terkait pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertahap dalam rangka memperkuat kemampuan masyarakat melalui penggalan potensi yang dimiliki masyarakat.

Sumodinigrat (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013:29) mengemukakan pendapat tentang konsep pemberdayaan masyarakat berpusat pada manusia dan kemanusiaan. Masyarakat mempunyai peranan besar dalam pemberdayaan sehingga mampu memperbaiki taraf hidup mereka. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dari yang kurang mampu atau terbelakang menjadi masyarakat yang mampu dan mandiri. Konsep pemberdayaan memiliki tiga komponen di dalamnya, yaitu:

1) *Enabling setting*,

Menciptakan iklim dan suasana baik bagi masyarakat sehingga mendukung agar potensi masyarakat bisa berkembang. Setiap masyarakat pasti memiliki daya yang kadang tidak mereka sadari. Oleh karena itu, tugas dari pemerintah daerah atau pelaksana pemberdayaan untuk dapat melakukan penyadaran pada masyarakat, serta menggali dan mengembangkan potensi yang ada.

2) *Empowering local community*,

Melakukan usaha penguatan potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dibutuhkan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga menciptakan peluang agar masyarakat lebih berdaya. Pemberdayaan tidak hanya tentang penguatan individu, melainkan semua pranata di masyarakat.

3) *Socio-political support*

Proses pelaksanaan pemberdayaan harus mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena memberdayakan juga berarti melindungi. Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan, fasilitas, dan pemberian dukungan pada masyarakat untuk berkembang. Dukungan sosial politik yang memadai sangat diperlukan, masyarakat lokal tidak akan bisa berkembang tanpa itu.

1.5.4.1.Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013:113) pemberdayaan merupakan proses pemberian daya kepada masyarakat, baik berupa kemampuan atau keberanian maupun kekuasaan dan posisi tawar. Praktik pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan biasanya terbatas pada penanggulangan kemiskinan atau dikenal dengan pemberdayaan ekonomi. Sumadyo (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013:113-116) membuat rumusan Tri Bina yang merupakan tiga upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat. Tri Bina sendiri tersusun dari:

a. Bina Manusia

Ilmu manajemen mengatakan bahwa manusia memiliki peran penting, yaitu sebagai sumberdaya juga sebagai pengelola dari manajemen itu sendiri. Bina manusia merupakan upaya utama yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat, meliputi

semua kegiatan dalam usaha penguatan atau pengembangan kapasitas sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kapasitas Individu, mencakup kapasitas pengembangan kepribadian, dunia kerja, dan keprofesionalan.
- (2) Pengembangan Kapasitas Entitas atau Kelembagaan, yang mencakup:
 - a) Visi, misi, dan budaya organisasi yang jelas
 - b) Struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi yang jelas
 - c) Proses organisasi atau pengolahan organisasi
 - d) Pengembangan mutu dan jumlah sumber daya
 - e) Interaksi antar individu di dalam organisasi
 - f) Interaksi organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain.
- (3) Pengembangan Kapasitas Sistem Jejaring yang mencakup pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama dan pengembangan interaksi dengan entitas atau organisasi di luar sistem.

b. Bina Usaha

Bina usaha adalah upaya utama dari bina manusia. Apabila bina manusia tidak memberikan dampak atau perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat maka akan menimbulkan kekecewaan. Bina usaha terdiri dari:

- 1) Memilih komoditas dan jenis usaha
 - 2) Melakukan studi kelayakan dan perencanaan bisnis
 - 3) Membentuk Badan Usaha
 - 4) Membuat perencanaan investasi dan menetapkan sumber-sumber pembiayaan
 - 5) Pengolahan sumber daya manusia dan pengembangan karir
 - 6) Manajemen produksi dan operasi
 - 7) Manajemen logistik dan finansial
 - 8) Melakukan penelitian dan pengembangan
 - 9) Melakukan pengembangan dan pengolahan Sistem Informasi Bisnis
 - 10) Mengembangkan jejaring dan kemitraan
 - 11) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung.
- c. Bina Lingkungan

Pengembangan AMDAL (Analisis Manfaat dan Dampak Lingkungan) pada setiap kegiatan membuat isu lingkungan menjadi penting. Keberlanjutan suatu kegiatan juga sangat dipengaruhi oleh pelestarian lingkungan. Sayangnya selama ini definisi dari lingkungan, sering diartikan sekadar lingkungan fisik, yaitu pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Padahal dalam praktik kehidupan lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam menunjang kegiatan.

Keberhasilan dari Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan sangat dipengaruhi oleh efektivitas kelembagaan. Hayami dan Kikuchi (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013:116) memberikan pengertian bahwa kelembagaan adalah suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas atau masyarakat. Prinsipnya, suatu bentuk relasi sosial dapat disebut sebuah kelembagaan apabila memiliki komponen, yaitu:

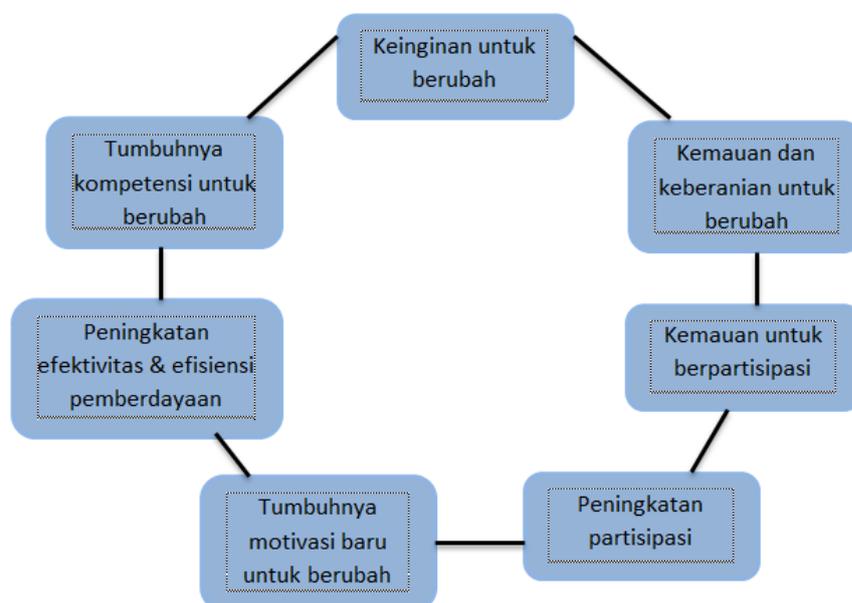
- 1) Komponen Person, yaitu di mana orang yang terlibat dalam suatu kelembagaan diidentifikasi secara jelas;
- 2) Komponen Kepentingan, di mana orang yang terlibat masing-masing memiliki kepentingan dan tujuan sehingga saling berinteraksi;
- 3) Komponen Aturan, suatu organisasi pasti memiliki kesepakatan bersama.
- 4) Komponen Struktur, yaitu tiap orang mempunyai peran dan posisi yang dijalankan, tidak bisa berubah sesuka kemauan sendiri.

1.5.4.2. Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Wilson (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013:112) mengatakan bahwa siklus dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari tujuh rangkaian tahap (Gambar 1.1).

Gambar 1.1

Siklus Pemberdayaan



a. Keinginan untuk berubah

Hal pertama yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki hidup. Upaya pemberdayaan tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada keinginan untuk berubah dari masyarakat.

b. Kemauan dan keberanian untuk berubah

Tahap kedua adalah memunculkan kemauan dan keberanian untuk berubah dari masyarakat. Demi terwujudnya perubahan serta perbaikan

yang diharapkan maka harus melawan hambatan yang ada dalam mengikuti pemberdayaan.

c. Kemauan untuk berpartisipasi

Pemberdayaan tidak akan berjalan tanpa partisipasi dari masyarakat, untuk itu kemauan untuk berpartisipasi dari masyarakat harus dikembangkan.

d. Peningkatan partisipasi

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah berjalan, akan membuat peningkatan peran dan partisipasi dari masyarakat yang telah merasakan manfaat atau perbaikannya.

e. Tumbuhnya motivasi baru untuk berubah

Akibat dari adanya peningkatan peran dan partisipasi dari masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, membuat motivasi-motivasi untuk terus melaksanakan perubahan meningkat.

f. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemberdayaan

Di tahap ini terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi pemberdayaan karena masyarakat sudah sadar akan pentingnya pemberdayaan.

g. Tumbuhnya kompetensi untuk berubah

Pada tahap terkahir ini, setelah masyarakat secara sadar dan mau untuk berpartisipasi dalam perubahan atau perbaikan melalui pemberdayaan, saatnya untuk meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pemberdayaan yang baru.

Konsep tahapan dalam pemberdayaan juga dikemukakan menurut Wrihantnolo dan Dwidjowijoto (2007:2) adalah sebagai berikut:

1) Penyadaran

Melakukan penyadaran kepada target yang akan diberdayakan, melalui pemberian pencerahan bahwa mereka memiliki sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.

2) Pengkapasitasan (*capacity building*)

Pemberdayaan disini berarti baik manusia, organisasi, atau sistem nilai harus memampukan diri (*enabling*). Artinya dalam memberikan daya atau kuasa yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu.

3) Pemberian Daya

Pada tahap ini pemberian daya atau *empowerment* maksudnya adalah target pemberdayaan diberi daya, kekuasaan, otoritas atau peluang.

1.5.4.3. Dimensi Keberhasilan Pemberdayaan

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 147-152) mengatakan bahwa terdapat empat dimensi yang menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan pemberdayaan. Empat dimensi tersebut, yaitu:

1) Akses

Dimensi ini terkait dengan target yang diberdayakan pada akhirnya memiliki akses akan sumber daya yang diperlukannya untuk mengembangkan diri. Kesetaraan dalam mendapatkan akses ke sumber

daya yang ada sangat diperlukan serta dalam mendapat manfaat yang dihasilkan dari pemberdayaan. Tidak adanya akses berdampak pada pemberdayaan menjadi tidak terlaksana. Salah satu dampak dari tidak adanya akses yang dimiliki, yaitu terjadinya kesenjangan di masyarakat.

2) Partisipasi

Keikutsertaan dari masyarakat dalam berbagai kegiatan program pemberdayaan yang ada sehingga masyarakat ikut berperan serta dalam setiap keputusan yang diambil.

3) Kontrol

Merupakan proses pengamatan atau pengawasan kegiatan secara berkelanjutan agar sesuai dengan rencana.

4) Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat mampu diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar manusia.

Aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan dari suatu kegiatan pemberdayaan di antaranya, yaitu:

- a) Pengurangan jumlah penduduk miskin
- b) Pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada
- c) Peningkatan kepedulian dari masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di daerahnya

- d) Peningkatan kemandirian kelompok dengan berkembangnya usaha produktif masyarakat, permodalan kelompok semakin kuat, serta meluasnya interaksi masyarakat.
- e) Peningkatan kapasitas masyarakat dan terjadi pemerataan pendapatan.

1.5.4.4. Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Faktor pendorong pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2013:188), yaitu:

- a) Sumber daya alam (SDA)
- b) Sumber daya manusia (SDM)
- c) Keadaan kelembagaan
- d) Sarana dan prasarana
- e) Kebijakan
- f) Organisasi dan administrasi pemberdayaan masyarakat

Faktor penghambat pemberdayaan berdasarkan pendapat Arsiyah (2009:379) yang mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan terdapat beberapa hambatan, yaitu hambatan internal dan eksternal.

Hambatan internal meliputi:

- a) Sumber daya manusia yang terbatas
- b) Bahan baku yang tidak tersedia
- c) Kemampuan manajerial terbatas
- d) Kurangnya kemampuan mengelola pasar yang ada
- e) Modal usaha yang terbatas

Hambatan eksternal meliputi:

- a) Kurang optimalnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat
- b) Belum ada pihak swasta yang memberikan bantuan modal atau kerjasama.

Kesimpulan yang peneliti ambil dari beberapa hasil jurnal terdahulu yang sudah diuraikan sebelumnya, yaitu pemberdayaan masyarakat harus disusun dengan memperhatikan keseimbangan antara masyarakat dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam melakukan pemberdayaan maka perlu disiapkan strategi pemberdayaan berupa membangun kerjasama dengan berbagai pihak serta yang paling penting melakukan koordinasi. Melihat uraian temuan dari penelitian terdahulu membuat peneliti akhirnya tertarik untuk meneliti tentang keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat. Peneliti memilih empat kriteria keberhasilan pemberdayaan untuk dijadikan pedoman dalam meneliti karena dianggap cocok dengan fokus penelitiannya, yaitu tentang hasil pemberdayaan.

1.6.OPERASIONALISASI KONSEP

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan salak di Desa Ngargosoko diartikan sebagai upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat Desa Ngargosoko melalui pemanfaatan potensi salak melimpah, yang akan dilihat dari:

1. Akses, yaitu kesempatan bagi masyarakat Desa Ngargosoko terhadap berbagai sistem dan sumber daya yang diperlukan, dapat dilihat dari:
 - a. Akses Fisik, berupa kemudahan dalam mendapat sumber daya dan kemudahan akses jalan
 - b. Akses Non Fisik, berupa minat dari masyarakat mengikuti pemberdayaan
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dari masyarakat Desa Ngargosoko dalam program pemberdayaan pengelolaan salak, yang akan dilihat dari:
 - a. Keikutsertaan masyarakat Desa Ngargosoko dalam pengambilan keputusan
 - b. Keikutsertaan masyarakat Desa Ngargosoko dalam perencanaan kegiatan
 - c. Keikutsertaan masyarakat Desa Ngargosoko dalam pelaksanaan kegiatan
3. Kontrol, yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan kegiatan pemberdayaan di Desa Ngargosoko berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang dapat dilihat dari :
 - a. Pendampingan dan pemantauan yang dilakukan
4. Kesejahteraan, yaitu kemampuan masyarakat Desa Ngargosoko dalam mencukupi kebutuhan dasarnya yang akan dilihat dari:
 - a. Tercukupinya kebutuhan sandang pangan masyarakat desa

1.7.METODE PENELITIAN

1.7.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah berupa pengamatan fenomena yang dapat dijelaskan secara terperinci dan ilmiah. Pemakaian metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada berdasarkan fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian.

Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Ngargosoko dalam pengelolaan salak sesuai dengan rumusan permasalahan, maksud dan tujuan penelitian. Pendekatan kualitatif membantu peneliti dapat memahami objek yang diteliti dan menangkap suatu fenomena secara utuh dari permasalahan yang diambil sesuai dengan kondisi sebenarnya.

1.7.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokus atau tempat pelaksanaan penelitian. Penelitian yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan salak di Desa Ngargosoko ini dilakukan dengan mengambil lokus di Desa Ngargosoko, Srumbung, Magelang.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian berperan sebagai informan yang memberikan informasi berguna terkait penelitian. Penulis telah memilih beberapa narasumber yang akan dijadikan informan dengan menggunakan dua teknik. Teknik pertama yang akan dipakai yaitu secara *purposive sampling*. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2017:85) *purposive sampling*

merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan untuk informan penelitian yang telah ditetapkan, yaitu kepala desa atau sekretaris desa dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang.

Teknik kedua yang akan dipakai adalah *accidental sampling* yang digunakan untuk mencari informasi dari masyarakat. Menurut Sugiyono (2017:85) *accidental sampling* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu informan yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dapat digunakan sebagai sampel apabila sesuai dijadikan sumber data.

1.7.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan yaitu berupa kata-kata (ucapan, pendapat dan gagasan) maupun tindakan yang diperoleh melalui wawancara. Sumber data lain, yaitu sumber tertulis seperti dokumen dan arsip resmi yang dimiliki oleh data sekunder.

1.7.5. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data sebagai pemenuhan kebutuhan penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu :

a) Data Primer

Merupakan sumber utama yang memberikan data secara langsung kepada peneliti. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara dari para informan yang telah ditetapkan dalam subjek penelitian, dan observasi.

b) Data Sekunder

Data ini merupakan data tidak langsung yang diperoleh dari sumbernya. Data sekunder dimanfaatkan sebagai data pendukung penelitian yang didapatkan melalui berbagai sumber yang sebelumnya telah ada, seperti laporan penelitian, karya tulis yang dipublikasikan, dan data-data statistik.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data, untuk itu teknik pengumpulan termasuk langkah yang penting dalam penelitian. Apabila tidak paham dengan teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2017:224). Pengumpulan data berguna untuk memahami, menangkap dan mengumpulkan informasi dari permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi merupakan data yang berhasil didapatkan dari pengamatan langsung di lapangan terhadap permasalahan yang diteliti.

b) Wawancara

Metode wawancara yang dipakai, yaitu wawancara semi terstruktur, dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi tertentu dari informan baik secara individu maupun berkelompok. Informasi diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mengarah pada tujuan dengan cara menanyakan langsung kepada informan. Wawancara semi terstruktur ini pewawancara bertanya sesuai panduan dan dipadukan dengan pertanyaan yang muncul seketika pada saat wawancara berlangsung. Penggunaan metode ini, pertanyaan bersifat terbuka sehingga pewawancara dapat memperoleh data/informasi tambahan selain dari daftar pertanyaan yang ada. Isi dari pertanyaan dapat disesuaikan dengan proses wawancara, sehingga tujuan dari pertanyaan dapat tercapai.

c) Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan memiliki contoh antara lain catatan, peraturan, dan kebijakan. Sementara dokumen dalam bentuk gambar contohnya, yaitu foto, bagan, sketsa, dan lain-lain. Teknik dokumentasi pada penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data-data sekunder serta foto.

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

Pada tahap ini proses analisis dan interpretasi data dilakukan secara interaktif sampai tuntas hingga datanya jenuh. Pada penelitian kualitatif analisis data dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah

selesai mengumpulkan data. Menurut pendapat Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017:338) terdapat beberapa tahapan dalam analisis data, yaitu:

a) Reduksi data

Data yang telah berhasil dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan catatan di lapangan akan dipilih mana yang utama dan penting. Data tersebut kemudian dikelompokkan untuk mempermudah melihat tingkat relevansinya dengan penelitian yang diambil. Setelah itu data yang telah dipilih akan dikategorikan sesuai jenisnya, kemudian peneliti menggunakannya untuk membuat ringkasan data kasar.

b) Penyajian Data

Setelah data direduksi kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penyajian data. Penyajian dilakukan dalam bentuk uraian teks naratif disertakan grafik, matrik, dan tabel. Data-data yang disajikan berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan salak di Desa Ngargosoko

c) Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Setelah data sudah tersaji semua, tahapan selanjutnya, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah, sekaligus menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Kemungkinan bisa terjadi perubahan dan perkembangan apabila bukti-bukti di lapangan tidak mendukung.

1.7.8. Kualitas Data

Pengecekan data penelitian menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi yang menurut pendapat Moleong (2007: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain sebagai pengecek atau pembanding terhadap data tersebut. Menurut Moleong (2007: 330-331) mengatakan bahwa triangulasi dengan sumber memiliki arti mengecek dan membandingkan kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang didapatkan dengan memakai waktu dan alat yang berbeda, yang bisa dilakukan dengan:

- a) Melakukan perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara,
- b) Melakukan perbandingan terkait apa yang diucapkan orang di depan umum dengan apa yang diucapkan secara pribadi,
- c) Melakukan perbandingan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d) Melakukan perbandingan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berada, orang pemerintahan,
- e) Melakukan perbandingan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.